

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : Kahfi Hudaya
NPM : 1905170388
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : KAHFI HUDAYA
N P M : 1905170388
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(FITRIANI SARAGIH S.E., M.Si)

Penguji II

(MUHAMMAD SHAREZA HAFIZ S.E., M.Acc)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA S.E., M.Si)

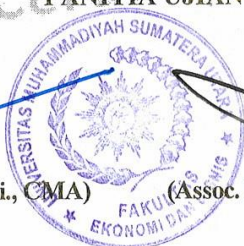
PANITIA UJIAN

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si, CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : KAHFI HUDAYA
N P M : 1905170388
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Oktober 2025

Pembimbing



(Pandapotan Ritonga SE., M.Si)

**Diketahui/Disetujui
oleh:**

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Lengkap : Kahfi Hudaya
N.P.M : 1905170388
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga SE., M.Si
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Catatan belahan masalah di penuhi	9/1 2025	[Signature]
Bab 2	- teori di tuliskan dari variabel - kerangka konsep final di penuhi		[Signature]
Bab 3	- definisi dan makna - rumus sederhana		[Signature]
Bab 4	- teori & metode di penuhi / deskripsi sederhana tabel	12/7 2025	[Signature]
Bab 5	kerangka & saran - rumus dan hasil penuhi - saran dan hasil		[Signature]
Daftar Pustaka	Sistem & data dari teori dan variabel penelitian		[Signature]
Persetujuan Sidang Meja Hijau	[Signature]	27/2 2025	[Signature]

Medan, 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assof. Prof. Dr.Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Pandapotan Ritonga SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAHFI HUDAYA
NPM : 1905170388
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2025

Yang membuat pernyataan



KAHFI HUDAYA

ABSTRAK

Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan

KAHFI HUDAYA

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian asosiatif, penelitian asosiatif adalah penelitian korelasional dengan menggunakan dua atau lebih variabel guna mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan hipotesis pengujian dengan jumlah sampel responden sebanyak 100 orang di BPKP Kota Medan.

Hasil dari penelitian ini yakni variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik(X) Diketahui memiliki nilai signifikan $0,01 < 0,05$ dan nilai t hitung = $-8,668 >$ dari t tabel = 2,626. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 75,141 dan nilai sig. 0,001.

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRACT

The Influence of the Implementation of Public Sector Accounting on the
Performance Accountability of Medan City Government Agencies

KAHFI HUDAYA

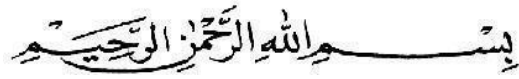
Accounting Study Program Faculty of Economics and Business
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

This study aims to examine the Effect of Public Sector Accounting Implementation on the Performance Accountability of Medan City Government Agencies. The type of research used in this study is by using associative research, associative research is correlational research using two or more variables to determine the relationship or influence between one variable and another. This study uses a quantitative approach. Quantitative data is data expressed in the form of numbers. Aims to explain the causal relationship between research variables and test hypotheses with a sample size of 100 respondents at the Medan City BPKP.

The results of this study, namely the Public Sector Accounting Implementation variable (X) is known to have a significant value of $0.01 < 0.05$ and the calculated t value = $-8.668 >$ from the t table = 2.626. So it can be stated that the Implementation of Public Sector Accounting has an effect on the Performance Accountability of Government Agencies. The results of the F test show a calculated F value of 75.141 and a sig. value of 0.001.

Keyword : Implementation of Public Sector Accounting, Accountability of Government Agency Performance

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan”.

Pada kesempatan ini penulis sangat menyadari bahwa dalam proposal ini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam hal teknik penulisan, bahasa yang digunakan, pengetikan, maupun isi yang dipaparkan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun penulis di masa yang akan datang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai. Pada akhirnya penulis sangat berharap semoga proposal ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, yaitu :

1. **Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. **Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. **Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. **Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. **Ibu Assof. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. **Bapak Riva Ubar S.E, M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. **Pandapotan Ritonga SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini
8. **Seluruh Bapak/Ibu Dosen** Program Studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi dan dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Medan, Mei 2024

Kahfi Hudaya
1905170388

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.3 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Konseptual	27
2.1 Hipotesis.....	28
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Definisi Operasional Variabel	29
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Pengujian Instrumen.....	34
3.6.1 Uji Validitas	34
3.6.2 Uji Reabilitas	35
3.7 Teknik Analisis Data	36
3.7.1 Uji Asumsi Deskriptif	36
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	36
3.7.3 Uji Hipotesis.....	39
BAB 4 HASIL PENELITIAN	42
4.1 Deskriptif Data	42
4.1.1 Deskriptif Objek Penelitian	42
4.1.2 Deskriptif Data Responden	42

4.1.3 Deskriptif Variabel Penelitian	44
4.2 Analisis Data	47
4.2.1 Pengujian Instrumen.....	47
4.2.2 Pengujian Statistik Deskriptif.....	49
4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik	50
4.2.4 Pengujian Hipotesis	53
4.2.5 Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB 5 KESIMPULAN	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah (BPKP Kota Medan) Tahun 2021 – 2022	2
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	30
Tabel 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	31
Tabel 3.4 Bidang BPKP Kota Medan	32
Tabel 3.5 Kriteria Skala Likert.....	33
Tabel 4.1 Presentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.2 Presentase Responden Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4.3 Presentase Responden Berdasarkan Riwayat Pendidikan.....	43
Tabel 4.4 Skor Kuesioner Penerapan Akuntansi Sektor Publik.....	44
Tabel 4.5 Skor Kuesioner Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ...	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik.....	48
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	48
Tabel 4.8 Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian	49
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	54
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial	55
Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1 Grafik Histogram	51
Gambar 4.2 Scatterplot Variabel.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01 Kuesioner Penelitian.....	61
Lampiran 02 Tanggapan Responden Kuesioner Variabel X.....	65
Lampiran 03 Tanggapan Responden Kuesioner Variabel Y.....	68
Lampiran 04. Output Hasil IBM SPSS.....	71

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan Akuntansi Sektor Publik berperan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah salah satunya yaitu dengan melakukan analisis bukti transaksi, pencatatan data transaksi, pengkhtisaran dan pelaporan. Akuntabilitas kinerja instansi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran tersebut. Penelitian Putra (2021) menyatakan Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Aulia (2021) menyatakan Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berbeda dengan Santoso, U. (2021) yang menyatakan Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Sektor publik sendiri memiliki area yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/usaha. Haryanto, dkk., (2020) menyatakan bahwa, jika ditinjau lebih dalam, Akuntansi Sektor Publik memainkan peran krusial dan menjadi bahan diskusi baik oleh praktisi sektor publik maupun akademisi. Perdebatan tentang Akuntansi Sektor Publik, yang seharusnya mendapat manfaat berasal bagian yang lebih besar asal praktisi serta akademisi, serius pada upaya buat membuatkan sektor publik, yang diklaim kurang efisien serta kurang menarik, untuk mengikuti sektor swasta, yang diklaim lebih maju serta efisiensi.

Akuntansi Sektor Publik, Menurut Haryanto (2017) menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik harus menyediakan layanan publik buat memenuhi kebutuhan publik. Pada beberapa hal, Akuntansi Sektor Publik tidak selaras menggunakan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat serta karakteristik akuntansi tadi ditimbulkan oleh disparitas lingkungan yang mempengaruhinya.

Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak- pihak yang memerlukan (Abdul Halim, 2021). Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 20 menyatakan bahwa laporan kinerja dihasilkan dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelapor dan/atau entitas akuntansi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai media atau alat bagi organisasi sektor publik untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi (Inpres No. 7 tahun 1999). Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan – urusan pemerintah dapat optimal.

Akuntabilitas merupakan suatu tanggung jawab dari tugas atau kewajiban yang sudah dilakukan. Akuntabilitas biasanya terkait dengan akuntansi dan manajemen dalam perusahaan. Akuntabilitas memiliki prinsip utama yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah media untuk melaporkan suatu keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas tuntutan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan. Apabila memenuhi suatu prinsip dalam ketepatan waktu dan juga sesuai dengan standar akuntansi pemerintah maka akuntabilitas kinerja dapat tercapai. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki peran yang sangat penting bagi terwujudnya suatu visi, misi, sasaran organisasi dan juga berfungsi sebagai penilaian kinerja. Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu akuntabilitas yang memadai. Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki hubungan erat yang kuat terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perkembangan yang menarik pada sektor publik di Indonesia ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh Lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun di daerah. Akuntansi Sektor Publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. (Mardiasmo, 2021)

Penelitian mengenai pengaruh Akuntansi Sektor Publik terhadap kinerja instansi pemerintah menyimpulkan hasil yang berbeda. Studi Pamungkas (2022) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan penelitian Dewi & Supadmi, (2024) menyimpulkan bahwa penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh negatif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Instansi Pemerintah di Indonesia sering mendapat sorotan dari masyarakat. Eksistensi pemerintahan yang baik saat ini masih jauh dari harapan, karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan publik. Kinerja di instansi pemerintah dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya masih dikategorikan jelek (Medistira, 2020).

Rata-rata nilai kinerja pemerintah kabupaten dan kota masuk kategori C (kurang) (Abnur, 2020). Salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Medan juga mengalami penilaian kinerja yang dinilai buruk. Menurut Alpi & Ramadhan, (2018) pengukuran kinerja (*Performance Measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Dilihat dari laporan pertanggungjawaban yakni LAKIP BPKP.

LAKIP merupakan salah satu laporan kinerja instansi yang bersifat *vertical* yaitu laporan kepada instansi yang di atasnya dan kepala administrasi Negara dan BPKP . Alur pelaporan LAKIP untuk pemerintah kota dan kabupaten sesuai dengan Impres No.7 tahun 1999 (Sihaloho & Halim, 2021). Berikut LAKIP BPKP Kota Medan 2021 – 2022 :

Tabel 1.1
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (BPKP Kota Medan) Tahun 2021 dan 2022

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		Keterangan
		2021	2022	
a. Perencanaan kinerja	100	97,87	91,56	-6,31
b. Pengukuran kinerja	100	92,25	80,12	-12,23
c. Pelaporan kinerja	100	93,15	79,89	-14,74
d. Evaluasi kinerja	100	95,50	89,20	-6,20
e. Capaian kinerja	100	95,67	75,35	-10,33
Tingkat akuntabilitas		Tidak Optimal	Tidak Optimal	-

Sumber : LAKIP BPKP Kota Medan 2021 – 2022

Berdasarkan data diatas ada sedikit penurunan yang terjadi di Kinerja BPKP terutama di pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja serta Capaian kinerja penyebab utamanya ialah para kinerja instansi pemerintahan ini tidak efektif, tidak

efisien dan tidak professional, ini berdampak tidak terwujudnya tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil. Dalam artian secara efektif berarti birokrasi memastikan aktivitas kinerja harus tinggi guna mencapai target target yang dicapai dan secara efisien berarti birokrasi harus memastikan penggunaan administrasi dan anggaran secara bijak dan proporsional. Menurut (Ardila & Putri, 2020) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.

Pentingnya akuntabilitas pada pemerintahan, karena dalam kinerja pemerintahan, yang merupakan keluaran/ hasil dari kegiatan/pogram yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur untuk kepentingan publik. Akuntabilitas pada sektor publik terkait erat dengan kinerja sektor publik dengan fokus tidak hanya pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tetapi juga lebih kepada bagaimana mencapai *outcome* dengan efisien dan efektif (Swasanany & Utama, 2019).

Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan menjadi wadah bagi pertanggung

jawaban seluruh instansi pemerintah (Swasanany & Utama, 2021).

Dari menurunnya 5 aspek komponen penilaian kinerja BPKP Kota Medan tahun 2021 – 2022 belum mendapatkan penilaian baik (B) atau masih belum baik (BB). Penilaian B (Baik) adalah nilai maksimal bagi kematangan manajemen kinerja instansi pemerintah. Nilai B menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah mampu menetapkan sasaran dan memilih aktivitas yang tepat dan efektif (Hanifah, 2021).

Dalam proses kinerja instansi pemerintahan terdapat pula penghambat dari capaian target tahun 2022 yaitu Dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh kementrian teknis dari pusat masih belum dapat diterapkan dan dipahami, Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah berubah dan belum optimal, Peraturan Perundang Undangan tentang pengelolaan keuangan dan asset cenderung berubah ubah sehingga diperlukan waktu untuk penyesuaian mengikuti peraturan yang baru, Terlambatnya laporan keuangan di SKPD Di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Inventarisasi dan pensertifikasi tanah tanah milik Pemerintah Kota Medan, Penilaian dan penghapusan barang milik pemko Medan, Masih ada beberapa jenis penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah yang tidak mencapai target dan Masih kurangnya sumber daya manusia (pengutip) dan potensi di lapangan kecil. Pengawasan internal dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai masalah diatas dengan judul **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik**

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu :

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terutama BPKP Kota Medan 2021 – 2022 Secara keseluruhan mengalami penurunan.
2. Hasil dari review komponen penilaian kinerja BPKP Kota Medan tahun 2021 – 2022 belum mendapatkan penilaian baik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut “Apakah Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan?”

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Apakah penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan ada manfaat yang baik dapat diambil bagi diri peneliti secara teoritis dan praktis. Manfaat dalam penelitian ini, yakni:

a) Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti mengenai Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas SDM terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dapat menambah wawasan peneliti dalam memecahkan masalah atas fakta yang terjadi selama penelitian.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pihak instansi pemerintahan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi instansi dan memperbaiki kendala yang di dalam menyelesaikan kinerja sehingga dapat mencapai tujuan instansi secara optimal.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Mardiasmo (2021) mendefenisikan Standar Akuntansi sektor publik adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Menurut Ratmono & Sholihin (2020) Akuntansi Sektor Publik adalah proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal.

Menurut Halim (2021) bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan

ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Erlina et al (2020) bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah proses pencatatan peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi yang sering dilakukan pada sektor publik seperti partai politik, masyarakat, sekolah universitas dan lain-lain. Menurut Handayani (2021) Akuntansi pada sektor publik didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitas kinerja keuangannya melibatkan produksi barang dan jasa publik yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Akuntansi Sektor Publik merupakan suatu sistem yang digunakan oleh lembaga publik sebagai sarana transparansi atau akuntabilitas kepada publik.

Menurut Bastian (2022) Akuntansi Sektor Publik adalah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Sektor Publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah lembaga publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkannya. Laporan pengelolaan keuangan ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Akuntansi Sektor Publik ini dapat digunakan sebagai alat transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik. Sektor publik yang dimaksud adalah lembaga pemerintah di daerah maupun pusat dan lembaga non-pemerintah, termasuk rumah sakit dan lembaga pendidikan.

2.1.1.2 Jenis Akuntansi Sektor Publik

Menurut Purwaningrum (2021) akuntabilitas publik terdiri terdiri atas dua

macam, yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal

Pertanggungjawaban vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana terhadap otoritas yang lebih tinggi, misalnya seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal

Pertanggung jawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Menurut Purwaningrum (2021) akuntabilitas dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a) Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas yang berlaku untuk semua tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk pemerintahan yang mana masing-masing pejabat ataupun pengurus publik baik kelompok maupun individu secara tingkatan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan terhadapatasannya langsung mengenai perkembangan kinerja aktivitas secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan.

b) Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan serta perkembangan yang akan dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

2.1.1.3 Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, Akuntansi Sektor Publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik menurut (Biduri, 2023).

Penerapan standar Akuntansi Sektor Publik merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyajian informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Sektor Publik juga memiliki kekuatan hukum yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Tujuan utama diterapkannya standar akuntansi pemerintahan adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan keuangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji dengan pengguna laporan keuangan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding. Dengan adanya standar Akuntansi Sektor Publik, maka pelaporan keuangan lebih berkualitas (Mahmudi, 2022).

2.1.2.2 Peranan Akuntansi Sektor Publik

Indra (2022) menjelaskan bahwa peran-peran Akuntansi Sektor Publik memiliki

rangkaian siklus, antara lain :

1) Perencanaan Publik

Dalam bagian ini, hal-hal pokok yang wajib diketahui adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1. Lebih dari itu, proses perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, memang perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas serta berterimanya arah dan tujuan organisasi. Lebih implisit, inti dari perencanaan adalah mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan.

2) Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara. Lebih dari itu, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya

dapat dikendalikan melalui anggaran.

3) Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses tersebut sangat terkait erat dengan kualitas keluaran.

4) Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5) Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

6) Audit Sektor Publik

Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen

terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah memosisikan dan menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, badan usaha milik Negara (BUMN), instansi pengelola aset negara lainnya, ataupun organisasi publik nonpemerintah, seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Maka itu, laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga menyangkal suatu opini.

7) Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Menurut (Darise, 2021) dapat dijelaskan prinsip akuntansi yang terkait dengan standar akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

a) Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

b) Nilai Historis

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada suatu perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c) Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

d) Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk meyakinkan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut dapat diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

f) Konsistensi

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g) Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h) Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.1.5 Indikator Akuntansi Sektor Publik

Dalam upaya pencapaian sasaran perlu sebuah alat ukur yang dinamakan indikator. Berupa:

1) Analisis bukti transaksi

- a) Setiap transaksi yang terjadi dicatat dan didukung dengan bukti- bukti transaksi.
 - b) Setiap melakukan analisis dan review terhadap informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi berdasarkan data dan bukti transaksi.
- 2) Pencatatan data transaksi
- a) Seluruh data transaksi tersimpan dalam komputer.
 - b) Seluruh kegiatan transaksi dicatat dalam fungsi akuntansi.
- 3) Pelaporan
- a) Laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
 - b) Laporan keuangan telah disusun secara sistematis dan jelas.
 - c) Laporan telah disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.
 - d) Laporan yang disajikan oleh instansi dapat dipahami oleh pengguna serta dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya.

2.1.1.5 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada sektor publik adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan

bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Menurut LAN dan BPKP (LAN & BPKP, 2000) akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban. Berdasarkan pada pengertian tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi instansi

yang bersangkutan.

Ledvina V. Carmo (1991) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan kewenangannya.

Istilah kinerja berasal dari job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2020).

Menurut Prawirosentono (2020) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Mulyadi (2021) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Sedangkan menurut (Sutrisno, 2022) prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja

Menurut Toman (2021) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (LAN,2023).

Menurut Mardiasmo (2021) Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

2.1.2.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut LAN (2003) pedoman penyusunan pelaporan AKIP tercantum juga bahwa pelaksanaan AKIP harus memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang berlaku.

- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Prinsip-prinsip yang lazim dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Menurut Indra Bastian (2021) prinsip-prinsip dalam penyusunan LAKIP sebagai berikut:

- 1) Prinsip pertanggungjawaban (adanya *responsibility center*), sehingga lingkupnya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (*conrollable*) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti oleh pembaca laporannya.
- 2) Prinsip Pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan target/standar/skema/budget, penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainya.
- 3) Prinsip manfaat, yaitu laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya.

Prinsip-prinsip penyusunan LAKIP berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2012 pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip lingkup pertanggungjawaban, hal-hal yang dilaporkan harus

proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.

- 2) Prinsip prioritas, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak selanjutnya.
- 3) Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripadabiaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

2.1.2.3 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (PEMDA) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator Kinerja Instansi Pemerintah dalam penelitian (Nur Heni Safitri, 2020), yaitu:

- 1) *input* (kualitas dan kuantitas)
 - a) Pegawai merasa mampu bekerja sesuai dengan standar instansi.
 - b) Dengan adanya komunikasi dengan atasan, Pegawai merasa terbantu untuk melaksanakan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu.
- 2) Proses (Ketaatan terhadap jadwal, ketaatan terhadap ketentuan)
 - a) Pegawai dapat mengatur waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.
 - b) Pegawai melakukan presensi masuk kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan perusahaan
- 3) *Output* (Inisiatif)
 - a) Pegawai menunjukkan kesediaan melakukan pekerjaan tanpa diperintah oleh atasan.

- b) Pegawai menunjukkan kesediaan melakukan pekerjaan tanpa diperintah oleh atasan.
- 4) *Outcome* (Peningkatan efisiensi, peningkatan efektifitas)
 - a) Pegawai selalu memanfaatkan fasilitas kerja yang ada dalam menunjang peningkatan efektifitas
 - b) Pegawai memiliki kemampuan mengarahkan dan membimbing pegawai lain untuk mencapai efisien dan efektifitas dalam bekerja

2.1.2.4 Tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- 1) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- 3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

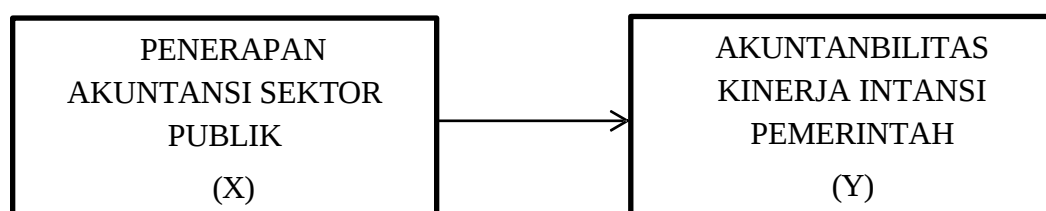
Nama	Judul	Hasil
Anim Wiyana, Sufiati, Yuyun Nurassratunnisa (2022)	Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Berdasarkan Hasil Pengolahan Uji Hipotesis Menunjukkan Bahwa Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Pangkajene.
Fildzah Ikram (2023)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang siantar	Berdasarkan Hasil Pengolahan Uji Hipotesis Menunjukkan bahwa Penerapan Standart Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dan Pengawasan Internal Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
Urip Santoso (2020)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud	Berdasarkan Hasil Pengolahan Uji Hipotesis Menunjukkan Bahwa Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
Ira Wirawati Purba (2023)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Berdasarkan Hasil Pengolahan Uji Hipotesis Menunjukkan Bahwa Ini Secara Parsial Yakni Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawas Internal
	Desa Bandar Setia Kabupaten Deli Serdang	Memiliki Pengaruh Signifikan Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Bambang Pamungkas (2022)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja	Berdasarkan Hasil Pengolahan Uji Hipotesis Menunjukkan Bahwa Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

	Instansi Pemerintah	Pemerintah.
Ilmi Rafarni Gea (2021)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.	Berdasarkan Hasil Pengolahan Uji Hipotesis Menunjukkan Bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3 Kerangka Konsepsual

Kerangka konsep menurut Sugiyono (2020) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di laksanakan.

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka konseptual dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Dari kerangka teori di atas terdapat lokasi penelitian yang akan di lakukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dimana penelitian ini akan melihat variabel terikat yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah apakah

dapat dipengaruhi oleh Penerapan Akuntansi Sektor Publik. Oleh karena itu peneliti merumuskan masalah “Apakah penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan?” dengan metode kuantitatif untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah terdapat pemecahan masalah peneliti melakukan kesimpulan dan dapat menjadi rekomendasi bagi instansi yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

2.4 Hipotesis

Menurut (Bahri,2020) Hipotesis adalah pernyataan sementara namun dapat diuji dan dapat untuk memprediksi apa yang ingin ditemukan peneliti dalam data empiris peneliti.

Berdasarkan uraian kerangka konseptual dan paradigma penelitian sebelumnya, Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

H_1 : Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiono, 2020). Adapun tujuan dari analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik data dalam bentuk angka yang digunakan yaitu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2020), penelitian ini merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode kausal komparatif (*causal-comparative research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab-akibat dan pengaruh antara dua variable atau lebih.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Definisi operasional variabel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item
1.	Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X)	Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.	1. Analisis bukti transaksi 2. Pencatatan data transaksi 3. Pelaporan	Likert
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan n pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (LAN,2023)	1. Input (Kuantitas dan Kualitas) 2. Proses (ketaatan terhadap jadwal , ketaatan terhadap ketentuan) 3. Output (Inisiatif) 4. Outcome (Peningkatan efisiensi, peningkatan efektifitas)	Likert

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jl. Gatot Subroto No. KM, RW.5, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai dari bulan Juni 2024 sampai Februari 2025. Adapun rincian waktu kegiatan penelitiannya yang terlihat dibawah ini :

Tabel 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

No	Aktivitas Penelitian	Maret 2024	April 2024	Juni 2024	Juli 2024	Agust 2024	Sept 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2024	Feb 2024
1	Pengajuan Judul											
2	Prariset											
3	Penyusunan Proposal											
4	Bimbingan Proposal											
5	Seminar Proposal											
6	Penyusunan Skripsi											
7	Bimbingan Skripsi											
8	Sidang Meja Hijau											

3.4 Teknik Pengambilan Data

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2020) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi juga bukan hanya orang, tapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek lain.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Kantor Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pegawai yang terlibat langsung dalam mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kantor Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan

Provinsi Sumatera Utara.

3.4.2 Sampel

Tabel 3.4 Bidang BPKP Kota Medan

No	Bidang – Pegawai	Jumlah
1	Pejabat Struktural	5
2	Koordinator Pengawasan	10
3	Subkoordinator	2
4	Pejabat Fungsional Auditor	51
5	Fungsional Arsiparis	3
6	Fungsional Pranata Komputer	6
7	Fungsional Analisis Kepegawaian	11
8	Fungsional Umum	12
Jumlah		100

Sumber : BPKP Kota Medan

Menurut Sugiyono (2020) menyatakan sampel adalah bagian dari populasi dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dan ketua tim atau kordinator pengawas di masing- masing bidang serta para staf auditor sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 100 orang. Pada penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti (Umar, 2020). Berikut rumus yang digunakan:

$$\frac{n = n}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance) e = 10% (0,10)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan data primer yaitu dengan cara :

1. Survei Metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Survei dapat dikelompokkan ke dalam *mail survey*, *computer-delivered survey* dan *intercept studies*.
2. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada pegawai (responden) di seluruh organisasi pemerintahan.

Responden diminta untuk melengkapi kuesioner dengan model skala likert untuk menunjukkan persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan dengan skor sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kriteria Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.6 Pengujian Instrumen

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan menggunakan metode kuantitatif. Sebelum kuesioner disebarkan oleh peneliti kepada responden, maka kuesioner perlu diuji terlebih dahulu agar data yang akan dianalisis memiliki derajat ketepatan dan keyakinan yang tinggi. Oleh karenanya

perlu dilakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

3.6.2 Uji Validitas

Menurut Ghazali (2020) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Kriteria yang ditetapkan untuk mengukur valid atau tidak suatu data adalah r hitungan lebih besar r table pada taraf signifikan 5% atau 0,05. Bila r hitung lebih besar dari r table maka alat ukur tersebut tidak memenuhi kriteria valid.

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan alat ukur berupa program komputer yaitu *Statistical Product And Service Solutions* (SPSS). Kolerasi setiap item pertanyaan dengan nilai total setiap variabel dilakukan dengan teknik kolerasi *pearson's product moment* untuk mengetahui apakah variabel yang diuji valid atau tidak dengan cara membandingkan hitung dengan tabel.

Keterangan :

$$r^{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum Y^2 - (\sum y)^2)}$$

r_{xy} = Item Instrument variabel dengan totalnya

= Jumlah butir pertanyaan

y = Skor total pertanyaan

n = Jumlah Sampel

3.6.2 Uji Reabilitas

Menurut Juliandi et al., (2021) tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat/mengukur apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ (Juliandi et al., 2021).

Kriteria Pengujiannya :

- 1) jika nilai koefisien reliabilitas yakni *cronbach alpha* $> 0,60$ maka instrumen variabel adalah reliabel (terpercaya).
- 2) jika nilai *cronbach alpha* $< 0,60$ maka variabel tidak *reliable* (tidak dipercaya).
- 3) Realibilitas berkaitan dengan tingkat keandalan suatu instrument penelitian.

Berdasarkan kriteria pengujiannya maka pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*, dikatakan reliabel jika hasil alpha $> 0,60$.

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis data deskriptif adalah suatu

metode untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis masalah objek yang diteliti, serta membandingkannya dengan pengertian yang ada. Metode ini berusaha untuk mendefinisikan masalah secara sistematis dan akurat, dengan memperhatikan fakta dari sifat objek penelitian.

3.7.1 Uji Asumsi Deskriptif

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Ghozali (2020) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dan memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus terpenuhi agar persamaan regresi dapat dikatakan sebagai persamaan regresi yang baik, maksudnya adalah persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Uji asumsi klasik tersebut biasanya sering digunakan pada persamaan regresi berganda. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.7.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel bebas (independen), variabel terikat (dependen) dan keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal (Ghozali, 2020).

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Salah satu syarat model regresi yang baik adalah data yang akan diuji terdistribusi secara normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, dengan ketentuan apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan apabila tingkat signifikansi kurang dari 5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Data yang normal akan terlihat melalui grafik histogram yang seimbang serta tidak condong ke kiri maupun ke kanan.

3.7.2.1 Regresi Linier Sederhana

Menurut Ghozali (2020) Regresi linier sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai t hitung $>$ nilai t tabel dan probabilitas signifikansi kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan hipotesis alternatif yang menyatakan variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen diterima. Analisis regresi linier sederhana yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan memasukkan satu variabel independen yang terdiri atas Penerapan Akuntansi Sektor Publik dengan satu variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$Y = \alpha + bX + e$$

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi masing-masing variabel X = Akuntansi Sektor Publik

e = Error

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisiensi Determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen tersebut. Koefisien determinasi yakni tingkat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yang dinyatakan dalam suatu persentase %. Menurut (Kuncoro, 2021) koefisiensi determinasi dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$D = R^2 \times 100\%.$$

3.8.2 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = n – 4.

Untuk mengetahui tingkat signifikan dapat dilakukan dengan uji-t dengan rumus, yaitu : $t =$

$$\frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{r^2}}$$

Keterangan :

$t = t_{hitung}$ yang dikonsultasikan dengan tabel t_r = Korelasi parsial yang ditemukan

n = Jumlah sampel

Adapun kriteria penerimaan hipotesis menurut (Juliandi et al., 2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
- 2) Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

BAB 4

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pada Penelitian ini, Peneliti memilih Kantor BPKP (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan) Kota Medan di Jl. Gatot Subroto KM. 5.5, Simpang Tanjung , Kec. Medan Sunggal, Kota Medan – Sumatera Utara sebagai objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung seperti dengan cara mendatangi responden yang bekerja di Kantor BPKP (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan) Kota Binjai Medan.

4.1.2 Deskripsi Data Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor BPKP (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan) Kota Medan, yaitu sebanyak 100 responden. Peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung, yaitu menggunakan lembar kuesioner.

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Tabel 4.1 Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	
	F	%
Laki-laki	45	45%
Perempuan	55	55%
Jumlah	100	100%

Sumber : Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang dengan presentase 45% dan jumlah responden dalam penelitian ini yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 55 orang dengan presentase 55%. Jadi total keseluruhan responden 100 orang.

Deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Tabel 4.2 Persentase Responden Berdasarkan Usia

Keterangan	Jumlah	
	F	%
23-27 Tahun	25	25%
28-33 Tahun	26	26%
33-40 Tahun	28	28%
>36 Tahun	21	21%
Jumlah	100	100%

: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang berusia 23-27 Tahun sebanyak 25 orang dengan presentase 25%, jumlah responden dalam penelitian ini yang berusia 28–33 tahun sebanyak 26 orang dengan presentase 26%, jumlah responden dalam penelitian ini yang berusia 33-40 tahun sebanyak 28 orang dengan presentase 28% dan jumlah responden dalam penelitian ini yang berusia >36 tahun sebanyak 21 orang dengan presentase 21%. Maka total keseluruhan responden sebanyak 100 orang.

Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Tabel 4.3 Persentase Responden Berdasarkan Riwayat Pendidikan

Keterangan	Jumlah	
	F	%
Diploma	27	27%
Sarjana	64	64%
Magister	9	9%
Doktor	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber : Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang berpendidikan terakhir Diploma sebanyak 27 orang dengan presentase 27%, Sarjana sebanyak 64 orang dengan presentase 64%, Magister sebanyak 9 orang dengan presentase 9%. Maka total keseluruhan responden 100 orang.

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Untuk lebih membantu berikut ini penulis sajikan tabel hasil skor jawaban dari responden dari angket yang penulis sebarakan yaitu :

Tabel 4.4 Skor Kuesioner Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X)

Alternatif Jawaban												
No	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	61	61%	38	38%	1	1%	0	0%	0	0%	100	100%
2	60	60%	39	39%	1	1%	0	0%	0	0%	100	100%
3	49	49%	49	49%	0	0%	2	2%	0	0%	100	100%
4	58	58%	41	41%	1	1%	0	0%	0	0%	100	100%
5	53	53%	46	46%	1	1%	0	0%	0	0%	100	100%
6	55	55%	42	42%	3	3%	0	0%	0	0%	100	100%
7	51	51%	47	47%	2	2%	0	0%	0	0%	100	100%
8	64	64%	36	36%	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%

Sumber : Diolah Peneliti (2025)

Dari tabel diatas untuk pernyataan atas variabel Penerapan Akuntansi Sektor

Publik dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dengan 8 butir pernyataan yang disebarakan oleh peneliti, responden lebih besar menjawab sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti.

- 1) Jawaban Responden tentang Setiap transaksi yang terjadi dicatat dan didukung dengan bukti-bukti transaksi, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju 61 orang.
- 2) Jawaban Responden tentang Setiap melakukan analisis dan review terhadap informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi berdasarkan data dan bukti transaksi, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju 60 orang.
- 3) Jawaban Responden tentang Seluruh data transaksi tersimpan dalam komputer, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju 49 orang.
- 4) Jawaban Responden tentang seluruh kegiatan transaksi dalam fungsi akuntansi, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju 58 orang.
- 5) Jawaban Responden tentang laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju 53 orang.
- 6) Jawaban Responden tentang laporan keuangan telah disusun secara sistematis dan jelas, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju 55 orang
- 7) Jawaban Responden tentang laporan telah disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju 51 orang.
- 8) Jawaban Responden tentang laporan yang disajikan oleh instansi dapat dipahami oleh pengguna serta dapat dibandingkan dengan laporan periode

sebelumnya, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju 64 orang.

Tabel 4.5 Skor Kuesioner Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Alternatif Jawaban												
No	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	41	41%	50	50%	9	9%	0	0	0	0	100	100%
2	45	45%	55	55%	0	0	0	0	0	0	100	100%
3	49	49%	48	48%	3	3%	0	0	0	0	100	100%
4	58	58%	39	39%	1	1%	1	1%	1	1%	100	100%
5	36	36%	53	53%	5	5%	2	2%	4	4%	100	100%
6	42	42%	55	55%	2	2%	1	1%	0	0	100	100%
7	56	56%	44	44%	0	0	0	0	0	0	100	100%
8	51	51%	48	48%	0	0	1	1%	0	0	100	100%

Sumber : Diolah Peneliti (2025)

Dari tabel diatas untuk pernyataan atas variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dengan 8 butir pernyataan yang disebarkan oleh peneliti, responden lebih besar menjawab sangat setuju dan Setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti.

- 1) Jawaban Responden tentang Pegawai merasa mampu bekerja sesuai dengan standar instansi, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju 41 dan Setuju 50.
- 2) Jawaban Responden tentang Dengan adanya komunikasi dengan atasan, Pegawai merasa terbantu untuk melaksanakan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju 45 dan Setuju 55.
- 3) Jawaban Responden tentang Pegawai dapat mengatur waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju 49 dan Setuju 48.
- 4) Jawaban Responden tentang Pegawai melakukan presensi masuk kerja sesuai

dengan jam kerja yang telah ditentukan Perusahaan, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju 58 dan Setuju 39.

- 5) Jawaban Responden tentang Pegawai menunjukkan kesediaan melakukan pekerjaan tanpa diperintah oleh atasan, mayoritas responden Sangat Setuju 36 dan Setuju 53.
- 6) Jawaban Responden tentang Pegawai menyadari kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut sebelum ditegur oleh atasan, mayoritas responden Sangat Setuju 42 dan Setuju 55.
- 7) Jawaban Responden tentang Pegawai selalu memanfaatkan fasilitas kerja yang ada dalam menunjang peningkatan efektifitas, mayoritas responden Sangat Setuju 56 dan Setuju 44.
- 8) Jawaban Responden tentang Pegawai memiliki kemampuan mengarahkan dan membimbing pegawai lain untuk mencapai efisien dan efektifitas dalam bekerja, mayoritas responden Sangat Setuju 51 dan Setuju 48.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Pengujian Instrumen

4.2.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Adapun kriteria pengujian menurut (Juliandi etl, 2015):

- a) Jika nilai *Pearson Corelation* (R_{hitung}) $> R_{tabel}$ maka butir pertanyaan dikatakan valid
- b) Jika nilai *Pearson Corelation* (R_{hitung}) $< R_{tabel}$ maka butir pertanyaan dikatakan

tidak valid.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X)

No Item	r Hitung	r table	Signifikan	Kriteria
1	0,539	0,195	0,001	Valid
2	0,605	0,195	0,001	Valid
3	0,605	0,195	0,001	Valid
4	0,715	0,195	0,001	Valid
5	0,737	0,195	0,001	Valid
6	0,647	0,195	0,001	Valid
7	0,622	0,195	0,001	Valid
8	0,632	0,195	0,001	Valid

Sumber : Output IBM SPSS, 2025

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No Item	r Hitung	r table	Signifikan	Kriteria
1	0,647	0,195	0,001	Valid
2	0,595	0,195	0,001	Valid
3	0,716	0,195	0,001	Valid
4	0,651	0,195	0,001	Valid
5	0,723	0,195	0,001	Valid
6	0,705	0,195	0,001	Valid
7	0,586	0,195	0,001	Valid
8	0,757	0,195	0,001	Valid

Sumber : Output IBM SPSS, 2025

4.2.1.2 Uji Reabilitas

Menurut (Juliandi et al., 2021) tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat/mengukur apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*.

Cronbach's Alpha adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ (Juliandi et al., 2015).

Kriteria pengujiannya:

1. Jika nilai koefisien reliabilitas yakni *cronbach alpha* $> 0,60$ maka instrumen variabel adalah reliabel (terpercaya).
2. Jika nilai *cronbach alpha* $< 0,60$ maka variabel tidak reliabel (tidak dipercaya).

Tabel 4.8 Uji Reabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Alpha	Kriteria
1	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	0,786	0,60	Reliabel
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,818	0,60	Reliabel

Sumber : Output IBM SPSS, 2025

Dari tabel di atas diperoleh variabel penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dinyatakan Reliabel.

4.2.2 Pengujian Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dan memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X	100	31	40	36.38	2.711
Total_Y	100	24	40	35.33	3.333
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output IBM SPSS, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X) memiliki nilai maksimum 40 nilai minimum sebesar 31 dengan nilai rata-rata sebesar 36,38 dan nilai standar deviasi sebesar 2,711 dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel atau $n=100$.
2. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) memiliki nilai maksimum 40 nilai minimum sebesar 24 dengan nilai rata-rata sebesar 35,33 dan nilai standar deviasi sebesar 3,333 dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel atau $n=100$.

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Salah satu syarat model regresi yang baik adalah data yang akan diuji terdistribusi secara normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, dengan ketentuan apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan apabila tingkat signifikansi kurang dari 5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* disajikan pada tabel dibawah dibawah ini :

Tabel 4.10 Hasil Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.30891278
Most Extreme Differences	Absolute		.075
	Positive		.068
	Negative		-.075
Test Statistic			.075
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.183
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.177
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.167
		Upper Bound	.187

a. Test distribution is Normal.

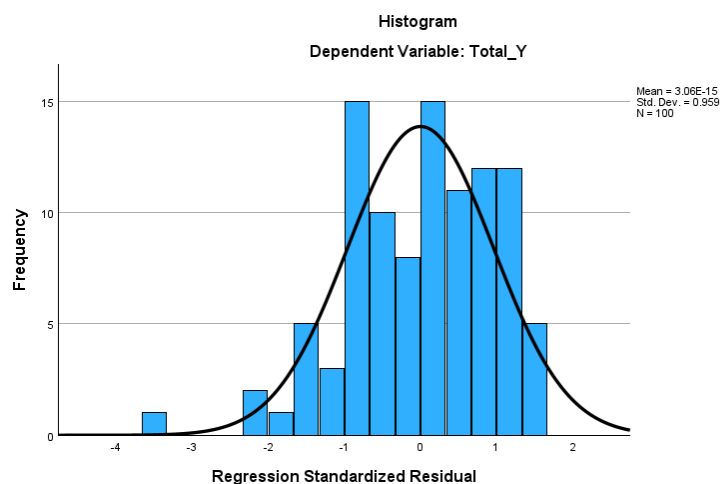
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber : Output IBM SPSS, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat sebagai data yang terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat pada nilai *Asymp Sign. (2-tailed)* untuk *unstandardized* residual sebesar 0,177 dimana lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini berarti uji normalitas terpenuhi. Data yang normal akan terlihat melalui grafik histogram yang seimbang serta tidak condong ke kiri maupun ke kanan.



Gambar 4.1 Histogram Grafik

Berdasarkan grafik histogram tersebut, maka dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal dikarenakan kurva berbentuk lonceng berada di tengah dan tidak condong ke kiri maupun ke kanan.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

4.2.4.1 Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien R square (R^2) digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Apabila R^2 mendekati 1, artinya variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.659 ^a	.434	.428	2.521

a. Predictors: (Constant), Total_X

b. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Output IBM SPSS, 2025

Tabel diatas menunjukkan nilai Adjust R^2 sebesar 0,434 atau 4,34%. Hal ini menunjukkan bahwa 4,34% dari variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu Penerapan Akuntansi Sektor Publik. Sedangkan sisanya sebesar 0,566 atau 5,66% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.2.4.2 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui secara parsial apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji parsial menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dimana variabel independen dianggap berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 5% atau 0,05. Hasil uji-t disajikan pada tabel di bawah ini Untuk mencari nilai t tabel digunakan rumus berikut :

$$(a/2) : (n-k-1)$$

Keterangan:

a : nilai signifikansi 0,05

n : unit analisis

k : jumlah variabel independent

Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	54.331	2.206	24.624	<.001
	Total_X	-.522	.060	-8.668	<.001

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Output IBM SPSS, 2025

$$Y = 0,171 X1 + 0,226 X2 + e$$

Dari tabel di atas, maka kesimpulan hasil Uji-t adalah sebagai berikut :

1. Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X) Diketahui memiliki nilai Sig. $0,01 < 0,05$ dan nilai t hitung = $-8,668 > t \text{ tabel} = 2,626$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

4.2.4.3 Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel dependen secara bersamasama terhadap variabel independen.

4.2.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.5.1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana untuk variable Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan menggunakan program IBM SPSS diperoleh memiliki nilai t hitung = -8,668 > t table = 2,626 dengan nilai signifikan $0,01 < 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Akuntansi Sektor Publik sendiri memiliki area yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/usaha. Haryanto, dkk., (2020) menyatakan bahwa, jika ditinjau lebih dalam, Akuntansi Sektor Publik memainkan peran krusial dan menjadi bahan diskusi baik oleh praktisi sektor publik maupun akademisi. Perdebatan tentang Akuntansi Sektor Publik, yang seharusnya mendapat manfaat berasal bagian yang lebih besar asal praktisi serta akademisi, serius pada upaya untuk membuat sektor publik, yang diklaim kurang efisien serta kurang menarik, untuk mengikuti sektor swasta, yang diklaim lebih maju serta efisiensi.

Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi

keuangan, perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Akuntansi Sektor Publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Santoso, 2022) menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai peran penting dalam kinerja instansi pemerintah, oleh karena itu sistem pengendalian intern pemerintah harus diterapkan dan dilaksanakan dalam menilai kinerja instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan agar kinerja instansi pemerintah mendapatkan hasil yang maksimal dalam tingkat melayani kebutuhan masyarakat.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa variabel Akuntansi Sektor Publik diketahui memiliki nilai sig. $0,01 > 0,05$ dan nilai t hitung = $-8,668 > t$ table = $2,626$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk BPKP Kota Medan, antara lain :

- 1) Bagi BPKP agar lebih meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik, agar lebih maju serta efisiensi.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah lebih banyak variabel yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, karena dalam penelitian ini hanya menggunakan Penerapan Akuntansi Sektor Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I., & Saat, S. (2022). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar* (S.Saat (ed.); 7th ed., pp. 423–427). Erlangga.
- Deni Harianto, K. A. (2021, Agustus 22). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6, 122-139.
- Dewi, M. A. P., & Supadmi, N. L. (2020). *Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Mananjerial Sektor Publik PadaAkuntabilitas Kinerja SKPD. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 50–63.
- Fadila, R. J., & Lestari, R. (2021). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru)*. *Prosiding Akuntansi*, 5(1), 103–108.
- Haryanto, H. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harun, M. I. (2022). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 91–109.
- Hasanah, Atikah. (2021). *“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Vi Medan)”*. Skripsi. Medan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Indra, B. (2022). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. UMSU Press.
- Juniawan, P. (2021). *“Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Ketidakpastian Lingkungan Kerja, Pengawasan Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”*. Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Kuncoro, M. (2021). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Mahmudi, M. (2014). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. In 20. BPFE PT Penerbit & Percetakan.

- Nugraeni nugraeni, Muhammad Budiantara. 2022. “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*”. Vol 12 (1). 18-32
- Oktaviani, A. (2021). “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd)”. *Jurnal Indonesia Manajemen, Akuntansi Ekonomi*. Vol 1 No.1
- Pamungkas, B. (2020). “Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik Dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*” 12(1), 1–10.
- Santoso, U. (2020). ”Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Center For Business Studies FISIP UNPAR*”, 14-33.

8 Sitasi Dosen Akuntansi :

- Dahrani, Saragih, F & Ritonga, P (2022), “Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan : Studi Pada UMKM DI Kota Binjai”. *Riset dan Jurnal Akuntansi*, 1509-1518.
- Hanum, Z & Faradilla, J (2023). “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI”. *Jurnal Riset dan Akuntansi*, 479-487.
- Hani, S & Fauzi, Z (2017), “Persepsi Pelaku UKM Terhadap Penyelenggaraan Laporan Keuangan”. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Indonesia*.
- Harahap, U, R , Januri, J & Sanjaya, S (2021). “Impelementasi SAK 45-Laporan Keuangan Nirlaba Pada Masjid Muhamadiyah Kota Medan”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Rahayu, E, S & Hariani, P & Sinambela, E (2022), “Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan Wilayah Pesisir Kabupaten Langkat Dalam Mencapai Blue Economy”. *Jurnal Ekonomikawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. 199-131
- Rialdy, N (2017), “Ánalisis Prediksi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score Pada PT. Adhi Karya (Persero) TBK”.
Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ritonga, P (2017). “Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Asset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. 1-14

Saragih, F (2017), “*Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan*”. *Jurnal Ekonomikawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. 57-68

Lampiran 1.1 Kuesioner Penelitian

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Sdr/i Responden
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya:

Nama : Kahfi Hudaya

NPM : 1905170388

Jurusan : Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Kota Medan”** untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak/Ibu/Sdr/i. Data yang diperoleh akan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian, sehingga kerahasiannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Saya mohon kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi kuesioner ini dengan se objektif mungkin. Dimohon disetiap pertanyaan untuk membaca sehati-hati agar tidak ada kesalahan dalam menjawab pernyataan. Demikian yang saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I yang telah meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pernyataan yang ada didalam kuesioner.

Medan, Juni 2024

Kahfi Hudaya
1905170388

Nomor :

DATA RESPONDEN

Berilah tanda silang (X) pada keterangan di bawah ini sesuai identitas diri : Nama

:

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Usia : ☐ 23 – 27 Tahun ☐ 28 – 33 Tahun
☐ 33 – 40 Tahun ☐ > 36 Tahun

Pendidikan Terakhir : ☐ Diplom ☐ Magister

☐ Sarjana ☐ Doktor

Petunjuk Umum Pengisian Kuesioner

Responden dapat menjawab setiap pernyataan dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Dimohon untuk membaca setiap pernyataan secara detail dan menjawab dengan lengkap setiap pernyataan.

Pada masing-masing pernyataan terdapat 5 alternatif jawaban, yaitu:

5. Sangat Setuju (SS)
4. Setuju (S)
3. Kurang Setuju (KS)
2. Tidak Setuju (TS)
1. Sangat Tidak Setuju (STS)

Data responden dan semua informasi yang diberikan akan terjamin kerahasiannya, oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner seobjektif

mungkin.

1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X)

No	Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
Analisis Bukti Transaksi						
1	Setiap transaksi yang terjadidicatat dan didukung dengan bukti-bukti transaksi.					
2	Setiap melakukan analisis dan riview terhadap informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi berdasarkan data dan bukti transaksi.					
Pencatatan data transaksi						
3	Seluruh data transaksi tersimpan dalam komputer.					
4	Seluruh kegiatan transaksi dicatat dalam fungsi akuntansi.					
Pelaporan						
5	Laporan keuangan dapat dugunakan dalam pengambilan Keputusan					
6	Laporan keuangan telah disusun secara sistematis dan jelas					
7	Laporan telah disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.					
8	Laporan yang disajikan oleh instansi dapat dipahami oleh pengguna serta dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya					

2. Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No	Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
Input (Kuantitas dan Kualitas)						
1	Pegawai merasa mampu bekerja sesuai dengan standar instansi.					
2	Dengan adanya komunikasi dengan atasan, Pegawai merasa terbantu untuk melaksanakan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu.					
Proses (ketaatan terhadap jadwal , ketaatan terhadap ketentuan)						
3	Pegawai dapat mengatur waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.					

4	Pegawai melakukan presensi masuk kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan perusahaan					
Output (Inisiatif)						
5	Pegawai menunjukkan kesediaan melakukan pekerjaan tanpa diperintah oleh atasan.					
6	Pegawai menyadari kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut sebelum ditegur oleh atasan					
Outcome (Peningkatan efisiensi, peningkatan efektifitas)						
7	Pegawai selalu memanfaatkan fasilitas kerja yang ada dalam menunjang peningkatan efektifitas					
8	Pegawai memiliki kemampuan mengarahkan dan membimbing pegawai lain untuk mencapai efisien dan efektifitas dalam bekerja.					

Lampiran 02 Tanggapan Responden Kuesioner Variabel X

NO	PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK								
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	TOTALX
1	5	5	5	4	4	4	4	5	36
2	5	5	4	5	5	5	5	4	38
3	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	5	4	4	5	4	4	3	4	33
5	5	5	5	5	5	4	4	5	38
6	5	5	5	5	5	5	5	5	40
7	5	5	4	5	5	5	5	5	39
8	5	5	4	5	5	5	4	5	38
9	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	4	4	5	4	4	4	5	5	35
11	5	4	5	5	5	4	4	4	36
12	5	5	4	4	4	4	5	5	36
13	5	5	4	5	5	5	5	5	39
14	5	5	4	5	5	5	4	5	38
15	5	5	4	4	4	4	4	5	35
16	5	5	5	5	5	5	5	5	40
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	4	4	4	4	4	4	4	4	32
19	5	5	5	5	5	5	5	5	40
20	5	5	5	5	5	5	5	5	40
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	5	4	4	4	4	4	3	5	33
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
24	4	4	5	5	5	5	5	5	38
25	4	4	4	4	4	3	4	4	31
26	5	5	4	4	4	4	5	4	35
27	5	5	4	4	4	4	4	5	35
28	5	5	5	5	5	5	5	5	40
29	5	5	5	5	5	5	5	5	40
30	5	5	4	5	5	5	5	5	39
31	5	5	4	5	4	4	4	5	36
32	4	4	4	4	4	4	4	4	32
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	4	4	4	4	4	4	4	4	32
35	4	4	4	4	4	4	4	4	32
36	5	4	2	4	4	4	4	4	31
37	5	5	4	5	5	4	5	4	37
38	4	5	4	5	4	5	4	5	36
39	4	5	5	5	4	5	4	5	37
40	4	4	4	5	5	5	4	4	35

41	5	5	2	4	5	5	4	4	34
42	5	5	4	5	4	3	4	5	35
43	4	5	5	5	4	5	4	4	36
44	5	5	5	5	5	5	5	5	40
45	5	5	5	5	5	3	4	5	37
46	5	5	4	5	5	5	5	5	39
47	5	5	5	5	5	5	4	5	39
48	5	5	5	4	4	4	4	5	36
49	4	4	5	4	4	4	4	4	33
50	5	5	4	4	4	4	4	4	34
51	5	5	4	4	4	4	4	4	34
52	5	5	5	5	5	5	5	5	40
53	4	4	4	4	4	4	4	4	32
54	4	4	4	4	4	4	4	4	32
55	4	4	4	4	4	4	4	4	32
56	5	5	5	5	5	5	5	5	40
57	5	5	5	5	5	5	4	5	39
58	5	4	5	5	5	5	5	5	39
59	4	4	5	5	5	4	5	5	37
60	5	4	5	5	5	5	4	5	38
61	5	5	5	5	4	4	4	4	36
62	5	5	5	5	4	4	4	4	36
63	4	5	5	5	4	5	4	4	36
64	5	5	4	5	5	4	5	4	37
65	5	5	5	5	5	5	4	4	38
66	5	4	5	4	5	5	5	5	38
67	5	5	5	5	5	5	5	5	40
68	5	5	5	5	5	5	5	5	40
69	4	4	4	4	4	4	4	4	32
70	5	5	4	4	4	5	5	5	37
71	4	4	4	4	5	5	5	5	36
72	5	3	4	4	5	5	5	5	36
73	4	4	4	4	4	4	4	4	32
74	4	5	5	4	5	5	5	5	38
75	5	4	4	4	4	5	5	5	36
76	5	5	5	5	4	4	5	5	38
77	3	4	4	4	5	5	5	5	35
78	4	4	5	5	5	5	5	5	38
79	4	4	5	5	4	4	5	5	36
80	4	5	5	5	5	5	5	5	39
81	4	4	4	3	4	4	5	5	33
82	5	5	5	5	4	4	5	5	38
83	5	5	4	5	5	4	5	5	38
84	4	4	5	5	5	5	5	5	38

85	5	5	5	5	5	5	5	4	39
86	4	5	5	5	5	5	4	4	37
87	5	5	5	5	5	5	5	5	40
88	5	5	4	4	5	5	5	5	38
89	5	5	5	5	4	4	5	5	38
90	5	4	5	5	5	5	5	4	38
91	5	5	5	5	5	5	4	4	38
92	4	4	4	4	5	5	5	5	36
93	5	5	5	5	5	5	5	5	40
94	4	4	4	4	5	5	4	5	35
95	4	5	5	4	4	5	5	5	37
96	4	5	4	5	4	5	4	5	36
97	4	4	5	5	4	4	5	5	36
98	5	5	4	4	5	5	4	5	37
99	4	4	4	4	3	4	4	4	31
100	4	4	4	4	4	5	5	5	35

Lampiran 03. Tanggapan Responden Kuesioner Variabel Y

NO	AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH								
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y. 6	Y.7	Y.8	TOTALY
1	5	5	5	5	4	4	5	5	38
2	5	5	5	5	4	5	5	5	39
3	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	5	5	5	5	4	4	4	4	36
5	4	4	3	4	4	4	4	4	31
6	4	4	4	5	4	4	4	4	33
7	4	4	4	4	3	4	4	4	31
8	4	5	4	4	4	4	4	4	33
9	5	4	5	5	4	4	5	5	37
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	3	4	4	4	3	3	4	4	29
12	5	5	5	5	4	4	5	5	38
13	5	4	4	5	3	5	5	5	36
14	5	5	4	5	4	5	5	5	38
15	5	5	4	5	4	5	5	4	37
16	5	5	5	5	5	5	5	5	40
17	3	4	3	4	2	2	4	2	24
18	4	4	4	4	3	3	4	4	30
19	5	5	5	4	4	4	4	4	35
20	4	4	4	5	5	5	4	4	35
21	4	4	5	5	4	4	5	4	35
22	5	4	4	5	4	4	4	5	35
23	5	5	5	5	4	5	4	5	38
24	4	4	3	4	4	4	4	4	31
25	5	5	5	5	4	4	5	5	38
26	5	5	4	4	4	4	4	4	34
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	5	5	5	5	5	5	5	5	40
29	4	4	4	5	4	4	4	4	33
30	4	5	4	5	4	4	5	5	36
31	4	4	4	5	4	4	4	4	33
32	4	5	4	5	4	4	5	4	35
33	4	4	4	5	4	4	4	4	33
34	4	4	4	4	4	4	4	4	32
35	4	4	4	4	4	4	4	4	32
36	4	4	4	4	4	4	4	4	32
37	4	4	4	4	4	4	4	4	32
38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
39	4	4	4	4	4	4	4	4	32
40	5	5	5	5	5	5	5	5	40

41	5	4	4	5	4	4	5	5	36
42	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	4	4	4	4	5	5	5	5	36
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32
45	4	4	4	4	4	4	4	4	32
46	3	4	5	2	1	5	5	4	29
47	3	4	4	4	1	4	5	5	30
48	4	4	5	4	3	4	5	4	33
49	4	5	4	1	1	4	5	4	28
50	5	5	4	3	4	4	5	5	35
51	4	4	5	4	4	4	4	5	34
52	3	4	4	5	1	5	5	4	31
53	5	5	4	4	2	4	5	4	33
54	5	5	5	5	5	5	5	5	40
55	4	4	4	5	4	4	4	4	33
56	5	5	5	5	4	5	5	5	39
57	5	5	5	5	5	5	5	5	40
58	4	5	5	5	5	5	5	5	39
59	4	5	4	4	5	5	5	5	37
60	4	4	5	4	5	5	5	5	37
61	5	4	5	4	5	5	5	5	38
62	5	5	5	5	4	4	4	4	36
63	4	4	4	4	4	4	4	4	32
64	5	5	5	5	5	5	5	5	40
65	5	5	4	5	4	5	4	4	36
66	4	4	5	5	5	4	5	5	37
67	5	5	5	5	5	5	5	5	40
68	4	4	5	5	5	5	5	5	38
69	4	5	5	5	5	4	4	4	36
70	4	5	5	5	5	5	5	5	39
71	4	4	4	5	5	5	5	5	37
72	5	4	5	5	4	4	4	4	35
73	4	4	4	4	5	5	5	5	36
74	5	5	5	5	4	4	5	5	38
75	5	5	4	5	5	4	5	5	38
76	5	5	5	5	4	4	4	4	36
77	4	5	5	5	5	5	5	4	38
78	5	5	5	5	4	4	4	4	36
79	4	5	5	5	5	5	5	5	39
80	3	4	4	4	4	5	4	5	33
81	4	5	5	5	5	5	4	5	38
82	5	5	5	5	5	5	5	5	40
83	4	4	4	4	4	4	4	4	32
84	3	4	5	5	5	5	5	5	37

85	4	5	5	4	4	4	5	5	36
86	5	5	5	5	5	5	5	5	40
87	3	4	4	4	5	5	5	5	35
88	5	5	5	5	5	5	5	5	40
89	5	5	5	5	5	5	5	5	40
90	5	5	5	5	5	5	5	5	40
91	3	4	4	5	4	5	5	5	35
92	4	4	4	4	4	4	5	5	34
93	5	5	5	5	5	5	5	5	40
94	4	4	4	4	4	4	4	4	32
95	4	4	5	4	5	4	5	4	35
96	4	4	5	5	5	4	4	4	35
97	5	4	5	5	5	5	5	5	39
98	5	4	5	5	5	5	5	5	39
99	5	5	5	5	4	4	4	4	36
100	4	4	5	4	5	5	5	5	37

Lampiran 04. Output Hasil SPSS

		Correlations								
		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	Total_X
X.1	Pearson Correlation	1	.559**	.097	.373**	.332**	.099	.131	.229*	.539**
	Sig. (2-tailed)		<.001	.337	<.001	<.001	.329	.193	.022	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X.2	Pearson Correlation	.559**	1	.240*	.469**	.238*	.222*	.148	.254*	.605**
	Sig. (2-tailed)	<.001		.016	<.001	.017	.026	.141	.011	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X.3	Pearson Correlation	.097	.240*	1	.524**	.273**	.225*	.305**	.316**	.605**
	Sig. (2-tailed)	.337	.016		<.001	.006	.024	.002	.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X.4	Pearson Correlation	.373**	.469**	.524**	1	.500**	.327**	.219*	.223*	.715**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	.029	.025	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X.5	Pearson Correlation	.332**	.238*	.273**	.500**	1	.622**	.448**	.350**	.737**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.017	.006	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X.6	Pearson Correlation	.099	.222*	.225*	.327**	.622**	1	.418**	.364**	.648**
	Sig. (2-tailed)	.329	.026	.024	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X.7	Pearson Correlation	.131	.148	.305**	.219*	.448**	.418**	1	.489**	.622**
	Sig. (2-tailed)	.193	.141	.002	.029	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X.8	Pearson Correlation	.229*	.254*	.316**	.223*	.350**	.364**	.489**	1	.623**
	Sig. (2-tailed)	.022	.011	.001	.025	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total_X	Pearson Correlation	.539**	.605**	.605**	.715**	.737**	.648**	.622**	.623**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations										
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.593**	.436**	.411**	.335**	.215*	.194	.322**	.648**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	.032	.053	.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.593**	1	.445**	.288**	.204*	.274**	.316**	.287**	.595**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	.004	.041	.006	.001	.004	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.436**	.445**	1	.378**	.398**	.420**	.408**	.468**	.716**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.411**	.288**	.378**	1	.512**	.289**	.147	.309**	.651**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.004	<.001		<.001	.004	.145	.002	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.335**	.204*	.398**	.512**	1	.461**	.168	.467**	.723**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.041	<.001	<.001		<.001	.094	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.215*	.274**	.420**	.289**	.461**	1	.547**	.663**	.705**
	Sig. (2-tailed)	.032	.006	<.001	.004	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	.194	.316**	.408**	.147	.168	.547**	1	.672**	.586**
	Sig. (2-tailed)	.053	.001	<.001	.145	.094	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.8	Pearson Correlation	.322**	.287**	.468**	.309**	.467**	.663**	.672**	1	.757**
	Sig. (2-tailed)	.001	.004	<.001	.002	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total_Y	Pearson Correlation	.648**	.595**	.716**	.651**	.723**	.705**	.586**	.757**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.789	8

Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.818	8

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X	100	31	40	36.38	2.711
Total_Y	100	24	40	35.33	3.333
Valid N (listwise)	100				

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

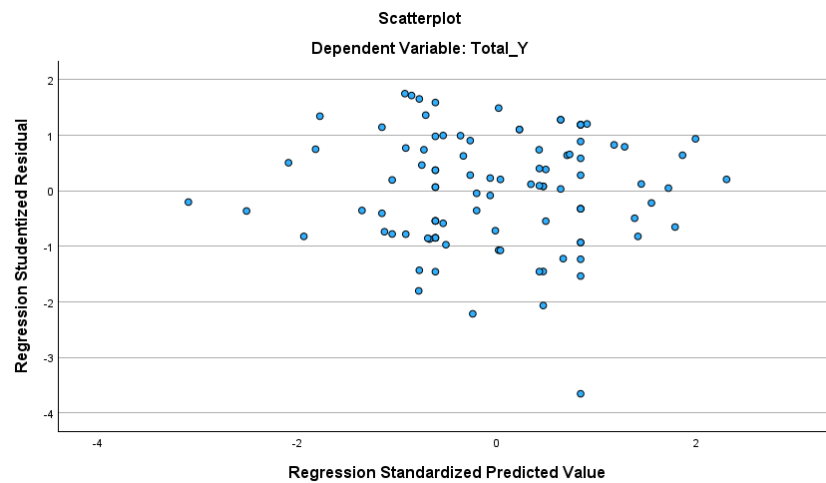
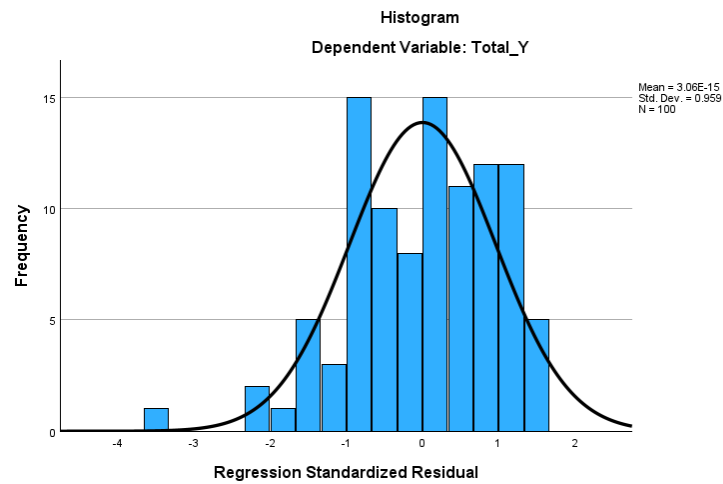
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.30891278
Most Extreme Differences	Absolute		.075
	Positive		.068
	Negative		-.075
Test Statistic			.075
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.183
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.177
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.167
		Upper Bound	.187

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.



Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Model			
1	X.1	.590	1.695
	X.2	.573	1.746
	X.3	.647	1.546
	X.4	.485	2.062
	X.5	.440	2.273
	X.6	.543	1.840
	X.7	.643	1.555
	X.8	.674	1.484

a. Dependent Variable: Total_Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.659 ^a	.434	.428	2.521

a. Predictors: (Constant), Total_X

b. Dependent Variable: Total_Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	54.331	2.206		24.624	<.001
	Total_X	-.522	.060	-.659	-8.668	<.001

a. Dependent Variable: Total_Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	477.434	1	477.434	75.141	<.001 ^b
	Residual	622.676	98	6.354		
	Total	1100.110	99			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X